



Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2014

"Evaluasi Kinerja Kemdikbud Tahun 2010-2014 dan Penuntasan Implementasi Kurikulum 2013"

**Hasil Sidang Komisi VII:
Kebijakan Pengembangan Kebudayaan**

TIM KOMISI VII

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Ketua Komisi : Wiendu Nuryanti (Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan)
Sekretaris : I Gede Arya Sugiarta (Rektor ISI Denpasar)
Koordinator Perumus : Kacung Marijan (Direktur Jenderal Kebudayaan)
Tim Perumus :

1. Nono Adya Supriyatno (Sekretaris Ditjen Kebudayaan)
2. Hary Widiyanto (Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman)
3. Endang Caturwati (Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman)
4. Sri Hartini (Direktur Pembinaan Kepercayaan Thd Tuhan YME dan Tradisi)
5. Endjat Djaenuderadjat (Direktur Sejarah dan Nilai Budaya)
6. Dyah Hariyanti (Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya)
7. Hurip Danu (Kepala Puslitbang Kebudayaan)
8. Bambang Sulistiyanto (Kepala Puslit Arkenas)
9. Karyaningsih (Inspektur I, Itjen Kemdikbud)
10. Winarni (Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Kebudayaan)
11. Devi Luthfiah (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa)
12. Marsis Sutopo (Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur)
13. Toto Sucipto (Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung)
14. Siswanto (Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta)
15. Sri Hartini (Kepala Dinas Budpar Prov. Sumatera Utara)

Anggota Komisi : 80 orang
Tim Substansi : 8 orang

RANCANGAN ISU/POKOK BAHASAN

**TOPIK BAHASAN : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN**

SUB TOPIK :

- 1) Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional
- 2) Penyelesaian Regulasi : Turunan UU Bidang Kebudayaan
- 3) Tindak Lanjut World Culture Forum
- 4) Implementasi Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan
- 5) Pengayaan Materi Kebudayaan Dalam Kurikulum

HASIL

DISKUSI SIDANG KOMISI VII

SUB TOPIK 1 : Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
1	Optimalisasi pemanfaatan taman budaya	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan dan revitalisasi taman budaya- Pemanfaatan taman budaya untuk melayani sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013
2	Regnas Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Segera dibentuk Tim Ahli di Propinsi/Kab/Kota dengan syarat mempunyai sertifikasi- Dilakukan koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam sertifikasi tim ahli- Dibuat rencana aksi, jadwal pelaksanaan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan regnas cagar budaya- Menyusun SOP dalam proses penetapan dan rencana pelaksanaan regnas- Gerakan Registrasi Nasional yang dilakukan ke Kab/Kota dengan surat edaran dari pusat ke daerah- Segera diselesaikan instrumen untuk data basenya

SUB TOPIK 1 : Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
3	Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	<ul style="list-style-type: none">- Gerakan Nasional Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda- Peningkatan Koordinasi dengan daerah, UPT, komunitas, dan perguruan tinggi dalam pencatatan warisan budaya tak benda- Disusun rencana aksi setelah penetapan terhadap warisan budaya tak benda- Menyusun SOP dalam proses penetapan dan rencana pelaksanaannya
4	Mitigasi bencana cagar budaya	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya SOP untuk mitigasi bencana- Kesiapsiagaan bencana baik untuk pengunjung dan cagar budaya
5	Revitalisasi Museum di Kab/Kota dimana kondisi fisiknya memprihatinkan	<ul style="list-style-type: none">- Agar ada bantuan dari pusat ke kab/kota untuk perbaikan terhadap museum kota/kab bisa dilakukan dengan pendataan koleksi maupun perbaikan kecil

SUB TOPIK 2 : Penyelesaian Regulasi

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
1	Penyelesaian RUU Kebudayaan sebagai sumber dari seluruh peraturan/regulasi di bidang kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- Inisiatif RUU Kebudayaan ada di Baleg DPR RI- Pihak Eksekutif akan menyiapkan DIM RUU Kebudayaan untuk memberikan masukan terkait dengan RUU tersebut- Pembahasan RUU Kebudayaan di DPR bersama dengan Pemerintah
2	Hak-hak Berkebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- Percepatan pemenuhan hak dasar setiap manusia, dan implementasinya termasuk dalam pendidikan- Memberi perlindungan terhadap hak-hak pada seluruh komunitas, dan hak kekayaan intelektual komunal- Implementasi kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan

SUB TOPIK 2 : Penyelesaian Regulasi

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
3	Penyelesaian RPP dari UU Cagar Budaya dan UU Perfilman	<ul style="list-style-type: none">- Segera menyelesaikan dokumen RPP tersebut sebelum KIB II berakhir- Pembangunan dan Revitalisasi museum
4	Kekuatan hukum dalam penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda	<ul style="list-style-type: none">- Percepat penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda- Menyusun SOP dalam penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda

SUB TOPIK 3 : Tindak Lanjut World Culture Forum

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
1	Belum optimalnya tindak lanjut hasil WCF 2013	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi hasil WCF 2013 ke Negara-negara lain dan daerah
2	Belum dilakukan persiapan WCF 2015	<ul style="list-style-type: none">- Pembentukan SC dan OC untuk mempersiapkan WCF 2015- Pelibatan daerah, komunitas, perguruan tinggi, dan budayawan dalam persiapan dan pelaksanaan WCF 2014-2015

SUB TOPIK 4 : Implementasi Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
KELEMBAGAAN		
1	Keragaman budaya di setiap daerah perlu dikelola dan dikembangkan	- Pendirian institut seni dan budaya di daerah
2	Adanya perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan museum	- Penguatan kelembagaan dan standarisasi museum
3	Variatifnya lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kebudayaan	- Inventarisasi lembaga pengelola kebudayaan

SUB TOPIK 4 : Implementasi Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
SDM & TATA KELOLA		
4	Adanya perbedaan nomenklatur dinas yang mengelola kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan nomenklatur dengan pusat
5	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi pengelola kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kesempatan S2/S3 pengelola kebudayaan- Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui diklat/bimtek
6	Perlunya pendataan aset budaya	<ul style="list-style-type: none">- Percepatan pencatatan warisan budaya tak benda tidak harus menunggu dari pusat, tetapi dapat dilakukan oleh propinsi/kab/kota/komunitas- Segera dilakukan pendataan aset budaya- Penguatan dapobud dan pembuatan data base sampai ke propinsi/kab/kota

SUB TOPIK 4 : Implementasi Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
7	Perlunya penyerdehanaan mekanisme penyusunan anggaran dan pelaksanaannya	- Segera disusun SOP dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya
8	Cetak Biru Nasional Pembangunan Kebudayaan	- Penyiapan Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Tingkat Propinsi dengan dukungan dalam bentuk dekonsentrasi

SUB TOPIK 5 : Pengayaan Materi Kebudayaan Dalam Kurikulum

No.	Isu Strategis	Rencana Aksi
1	Belum lengkapnya fasilitas sarana kesenian di sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Menambah sarana dan prasarana kesenian di sekolah
2	Belum adanya lab seni budaya di dalam standar sarana prasarana sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dimasukkan lab seni budaya sebagai standar minimal pembakuan sarana dan prasarana di sekolah- Perlunya pembangunan lab. Seni budaya di sekolah
3	Kurangnya guru kesenian di sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan seniman/budayawan setempat dan alumni perguruan tinggi seni sebagai pengajar seni budaya
4	Kurangnya media pembelajaran seni budaya di sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Pembuatan modul tentang seni budaya untuk pendamping buku pembelajaran seni budaya untuk guru dan siswa- Pembuatan modul pengayaan seni budaya berbasis daerah untuk guru dan siswa- Pemanfaatan museum, galeri, taman budaya, situs, bangunan bersejarah sebagai tempat pembelajaran

TERIMAKASIH